

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



**KABUPATEN
KEPULAUAN
MERANTI**

2023

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,31	68,95	0,932%
2	Angka Kemiskinan	23,84	22,98	-3,607%
3	Angka Pengangguran	5,5	5,17	-6,000%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,17	4,81	51,735%
5	Pendapatan Per-Kapita	118657,12	120914,45	1,902%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,266	0,282	6,015%

Sumber data: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

2. RINGKASAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan wajib berkegiatan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2023

NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58,12%	62,41%
1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	80,59%	81,34%
1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	61,07%	61,50%
1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang/atau berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	16,28%	7,77%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 sebesar Rp 304.931.004.374,44 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 3
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Terkait Urusan Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
	PEMBAHANGUNAN	
1	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4	Program pengendalian pertman pendidikan	Penerbitan Ibt Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penerbitan Ibt PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Masih belum maksimalnya program peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, sehingga banyak Guru yang belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUK) untuk Mengantikan Kepala Sekolah yang habis masa jabatan karena tidak memiliki Sertifikat Cakap
- ii. Dikarenakan adanya aplikasi ARKAS yang memerlukan operator computer, maka kebutuhan sdm yang memahami IT sangat diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut
- iii. Masih banyak Sekolah-sekolah yang akses jalannya belum memadai sehingga apabila cuaca hujan atau terkena air pasang naik tidak sedikit anak-anak dan guru tidak bisa ke sekolah
- iv. Masih banyak sekolah-sekolah yang sarana dan prasarana nya kurang memadai atau tidak layak.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2023

NO URK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,94%	1,40%
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,17%	85,58%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,51%	92,15%
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,10%	99,81%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,36%	88,84%
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	97,72%
1.b.8	Persentase orang usia 15-55 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,64%	77,88%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,73%	97,19%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,80%	81,80%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,10%	100%
1.b.12	Persentase ODG: berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,80%	100%
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	102,71%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 sebesar Rp 166.297.810.957,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 5
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Terkait Urusan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KEGIATAN
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan Secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota Pencapaian kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kampanye, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Undas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Masih kurangnya pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di daerah sulit;
- ii. Perlunya pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat terhadap pencegahan penyakit;
- iii. Perlunya pemeliharaan prasarana khususnya ambulance darat dan ambulance laut yang ada di kecamatan;
- iv. Kondisi bangunan rumah sakit yang mengalami kerusakan ringan dan sedang di beberapa bagian gedung;
- v. Kurangnya sumber daya manusia kesehatan dan non-kesehatan di UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti karena jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir;
- vi. Beban operasional yang ditanggung oleh RSUD diluar gaji ASN/Non ASN sangat besar dan masih memerlukan dukungan anggaran baik dari pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan ke masyarakat;
- vii. Beban hutang rumah sakit yang membesar setiap tahunnya karena subsidi silang tarif BPJS tidak dapat menutupi keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 sebesar Rp 107.975.848.460,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 7

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
	PEMBANGUNAN	
1	Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota
4	Program penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kendala mutu yang disebabkan karena faktor material, Faktor Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Faktor Konsultansi Pengawas pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik atas pemenuhan volume pekerjaan yang ditawarkan oleh penyedia

- ii. Adanya kebijakan pemangkasan anggaran atau rasionalisasi pada tahap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan terlaksananya program kegiatan yang telah ditargetkan pada APBD murni;
- iii. Penyedia jasa kurang menguasai dan mengerti aspek-aspek teknis pelaksanaan.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2023

NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	66,67%	95%
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1,58%	0,084%
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTUH (Rumah Tidak Layak Huni)	16,34%	0,11%
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	0%

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

Realisasi belanja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 sebesar Rp 30.836.636.097,68 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 9

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
	PEMBANGUNAN	
1	Program pengembangan Perumahan	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
2	Program kawasan permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan rutinitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5	Program pengelolaan persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya Program Penatagunaan Tanah yang Mendukung indikator sasaran OPD (Cakupan Wilayah dengan basis data pertanahan yang berkualitas) didalam RPJMD dan Rencana OPD, sehingga sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan OPD;
- ii. Belum optimalnya pelaksanaan Penanganan kawasan

- kumuh terpadu dikarenakan belum fokusnya penganggaran pada program tersebut:
- iii. Rendahnya Indeks Kualitas Air yaitu 52.6 dengan Kategori Sedang yang disebabkan oleh tidak terkendalinya pencemaran yang bersumber dari limbah dan air buangan usaha dan atau kegiatan Industri;
 - iv. Belum optimalnya penanganan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - v. Capaian target penanganan sampah masih rendah yaitu 27 %, sedangkan target persentase sampah yang tertangani tahun 2023 pada sasaran OPD yaitu 30 %;
 - vi. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - vii. Masih kurangnya SDM pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) kebutuhan ASN adalah sebanyak 88 orang sementara saat ini ASN yang ada hanya berjumlah 17 Orang

5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2023

NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	93,33%	0%
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditagalkan	100%	0%
1.e.3	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,31%	100%
1.e.4	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,16%	100%
1.e.5	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	0%
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	0

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 sebesar Rp 15.736.656.181,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- i. Ketentraman dan Ketertiban Umum: Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah, penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati/Walikota, dan Pembinaan PPNS Kabupaten;

- ii. Bencana: Penanggulangan bencana Kabupaten
- iii. Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas baik kendaraan dinas maupun peralatan serta operasional perlengkapan lainnya.
- ii. Kurangnya PFNS yang bertujuan untuk menghasilkan aparaturnya dan penyidik PNS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- iii. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti.
- iv. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- v. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas baik itu kendaraan operasional maupun peralatan dan perlengkapan kantor.
- vi. Masih kurangnya anggota Satpol PP dan Banpol PP di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pentadama

Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti

- vii. Untuk mendukung kinerja aparaturnya yang tinggi di Lingkup Satpol PP, diperlukan mengikuti pendidikan/pelatihan.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2023

NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	13,66%	83,59%
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 sebesar Rp 6.418.953.198,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 12
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Terkait Urusan Sosial
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KEGIATAN
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Pant) Sosial
2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Banyaknya jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdata yaitu berjumlah 2.801 Keluarga tidak sebanding dengan jumlah Alokasi Anggaran Daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mana pada Tahun 2023 berjumlah Rp. 20.000.000,-. Adapun jumlah akumulasi Komunitas Adat Terpencil yang mendapat Pemberdayaan Sosial sampai dengan tahun 2023 berjumlah 393 dari 2.801 Keluarga atau sekitar 14%;
- ii. Minimnya alokasi Anggaran daerah untuk Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar sehingga dari total jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yaitu sebanyak 2.655 Orang yang baru mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial sampai dengan Tahun 2023

berjumlah 636 Orang atau sekitar 24 %:

- iii. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Sosial baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih ada yang tidak tepat sasaran hal ini menyebabkan penurunan Persentase Penduduk Miskin di kabupaten Kepulauan Meranti hanya sekisaran 1 %.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,4481 dan status kinerja rendah.

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riuu Nomor 170-A/S/XVIII/PEK/06/2023 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan Opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Hal ini dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (*Unaudited*) Tahun 2023, Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 mencapai sebesar Rp 1.180.122.990.487,32 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 mencapai Rp 1.142.343.109.144,52.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 13
Rincian Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	223.652.732.201,00	144.790.352.955,32	64,73%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan	707.837.968.000,00	935.353.084.856,00	132,18%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.633.761.452,00	99.979.552.676,00	106,78%
TOTAL PENDAPATAN		1.024.984.461.653,00	1.180.122.990.487,32	115,14%

Tabel 14
Rincian Belanja Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
5.1	Belanja Operasi	960,333,621,444.00	830,997,862,397.07	86.60%
5.2	Belanja Modal	138,491,143,696.00	129,280,718,647.45	93.35%
5.3	Belanja tidak terduga	1,144,785,200.00	746,785,200.00	65.25%
5.4	Belanja Transfer	163,333,861,466.00	161,817,762,900.00	98.86%
JUMLAH BELANJA		1,263,703,194,805.00	1,142,343,109,144.52	90.40%

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki inovasi sebagai berikut:

Tabel 15
Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Aplikasi Simbako (Sistem Informasi Kebutuhan Bahan Pokok)	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Transformasi Silangit (Sistem Peningkatan Layanan Pendidikan)	
3		Layanan Silamudik (Sistem Layanan Mutu Pendidikan)	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi Slaga Lapor yang berbasis android	
5	Dinas Kesehatan	KONSPIRASI (KONSULTASI PINTAR AMAN DAN SEHAT) BERSAMA MISS RING RING	
6		GAS (Gerakan Ayah Slaga)	

7		LASKAR CENTING (Cegah Stunting)	
8		MISS RING RING	
9	Dinas Perikanan	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Usaha Bersama (KUB) berbasis Online	
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SEDAP (Semua Data dalam Satu Peta)	Tahun 2022
11		CANDA DATUK DIKOPER (Cek Tekanan Darah Anda untuk Mendeteksi Risiko Hipertensi)	
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	ESKRIM (Elektronik Sistem Klinik Riset Inovasi Meranti)	Tahun 2023
13		SI-Taman (Sistem Tagging Mandatory)	Tahun 2023
14		SePeDa-KITa (Searah Perencanaan Daerah) Renstra, Renja, RKPD, RPJMD, RPJPD Tahun 2023	
15	Inspektorat Daerah	Meranti Tangkis	
16	Badan Pendapatan Daerah	ERA BAKU Integrasi aplikasi SITANJAK dan aplikasi pada Bank Riau Kepri	
17		TREN Ritur Mobile Payment	
18		JENGAH LAUT Pajak Denda/ Tunggakan dihapuskan Sempena Ulang Tahun Meranti	
19		BEJAMBOL (Bersama Jajaran Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola)	
20		MY DARLING (Mobil Layanan Daerah Keliling)	Tahun 2022
21		SEPAK BANG (Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan)	Tahun 2023

22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LAWA (Layanan Online Whatsapp)	Tahun 2021 - Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi Whatsapp secara online, sehingga pengguna layanan tidak perlu mendatangi kantor Dinas/UPTD untuk mendapatkan dokumen yang membutuhkan pencetakan khusus seperti KTP dan KIA.
23		TINGKAP (Tiap Pernikahan Langsung Dapat KK dan KTP)	Tahun 2021 - Pelayanan administrasi kependudukan (KK dan KTP-el) bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sehingga saat pelaksanaan pernikahan pasangan sudah memiliki dokumen (KK dan KTP-el) terbaru.
24		SELESE (Selesai Lahiran diberi Sepaket Akta)	Tahun 2021 - Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk kelahiran anak dari pernikahan berupa akta kelahiran, NIK anak dalam KK terbaru, dan juga identitas anak
25		LEPAK (Lingkungan Pendidikan Peduli Administrasi Kependudukan)	Pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan sekolah mulai dari jenjang tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan SLTA, berupa penerbitan akta bagi anak didik yang belum memiliki KIA (untuk anak didik kurang dari 17 tahun) maupun KTP-el (bagi anak didik usia 17 tahun ke atas)

26		MELALA (Melakukan Pelayanan Jemput Bola)	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh petugas Dinas/UPTD bagi penduduk dengan mendatangi langsung kediaman warga yang membutuhkan layanan adminduk seperti lansia, ODGJ, orang sakit dsb
27		MEMBARA (Mendapat Musibah/Bencana Administrasi Kependudukan diantar)	Pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terkena musibah berupa dokumen kependudukan yang diantar langsung ke kediaman penduduk yang mendapat musibah oleh petugas Dinas/UPTD
28		SEPEDA ADEK (Segera Perbaiki dan Update Data Dokumen Kependudukan)	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan terbaru dikarenakan adanya perubahan elemen data penduduk pada dokumen kependudukan sebelumnya
29		SAKTI (Serahkan langsung Akta Kematian)	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa penerbitan dokumen Akta Kematian dan Kartu Keluarga (KK) baru bagi anggota keluarga yang tinggal
30		SEDAP (Sweet Seventeen Dapat KTP el)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan perekaman bagi siswa/pelajar sebelum umur 17 tahun, maka nanti saat sudah menginjak umur 17 tahun KTP-el bisa dicetak dan diserahkan sebagai hadiah ulang tahun